



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat dan rahmat-Nya telah diselesaikannya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023. Penyusunan LPPD ini merupakan salah satu kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD yang tertuang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Pembinaan Kepegawaian Tahun 2023 guna mencapai misi dan tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), efisien, efektif, bersih dan responsif serta dapat dikontrol oleh semua pihak.

Penyusunan LPPD Tahun 2023 ini secara sistematis telah disesuaikan dan mengacu kepada Surat Pj. Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100/5586/RO-PEM tanggal 30 November 2023 tentang Permintaan Data Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Dokumen LPPD yang disusun ini berdasarkan hasil kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2023 pada masa kepemimpinan Kepala Badan Periode tahun yang bersangkutan.

Semoga LPPD Tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat kedepannya.

Pontianak,

2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,



Drs. ANI SOFIAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650602 198603 1 018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR GAMBAR	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG		1
I.1.1 Penjelasan Umum		1
A. Dasar Hukum.....		1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....		3
C. Jumlah Pegawai.....		14
D. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja		32
E. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sub Kegiatan		34
I.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah		40
A. Permasalahan Strategis Perangkat Daerah		40
B. Program Perangkat Daerah Berdasarkan RPJMD		41
C. Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan		42
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	46
II.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		46
II.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran		46
II.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil		46
II.1.3 IKK Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		46
II.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		48
II.2.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja		48

II.2.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	49
II.2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya ..	52
II.2.4	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan RPJMD.....	53
II.2.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
II.2.6	Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja	56
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	57
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	58
BAB V	PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2023	14
Tabel 2. Total Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2023.....	32
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2023.....	34
Tabel 4 Alokasi Penganggaran Kegiatan TA. 2023.....	42
Tabel 5. Target Kinerja Tahun 2023	49
Tabel 6. Capaian Kinerja IKU TA. 2023	50
Tabel 7. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022-2023.....	53
Tabel 8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah.....	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

I.1.1 Penjelasan Umum

A. Dasar Hukum

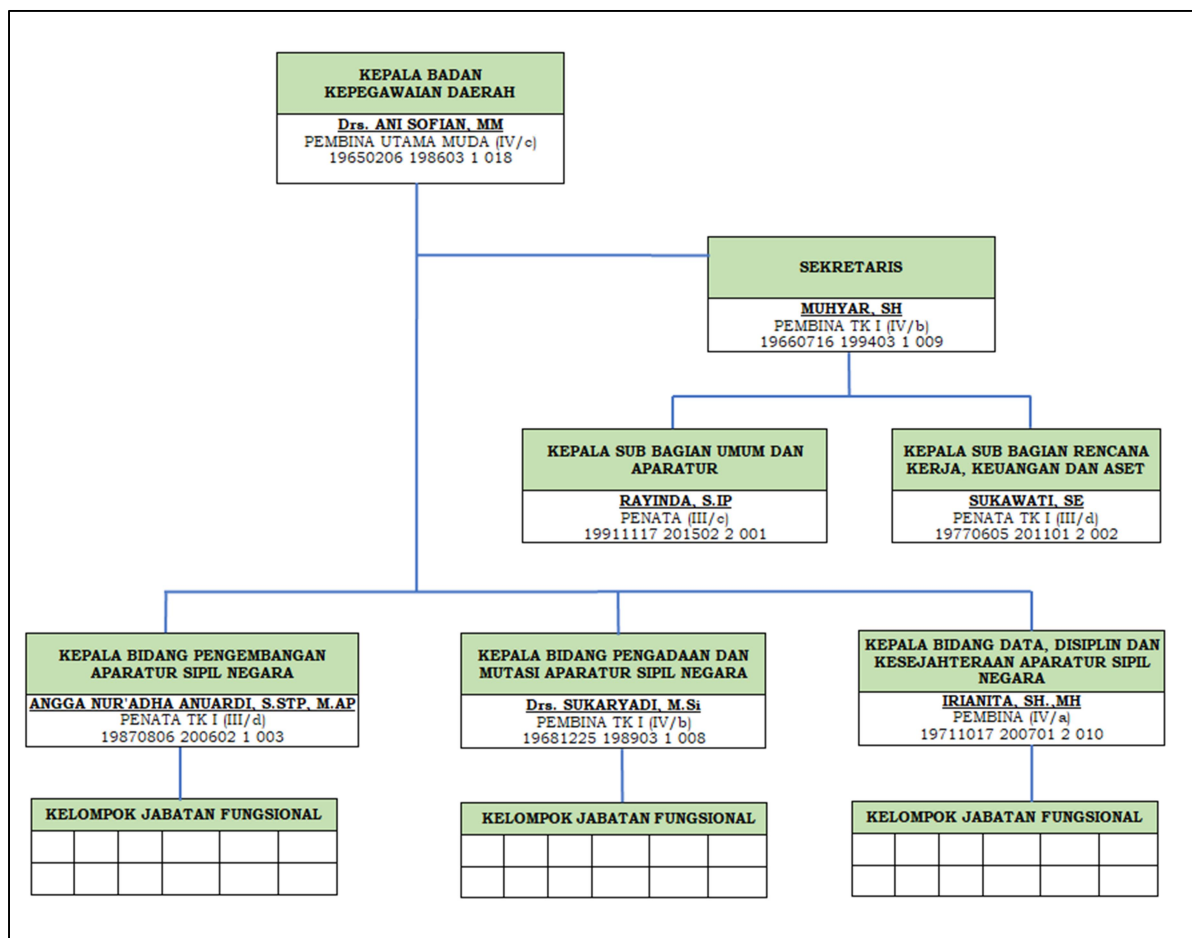
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas membantu Gubernur untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian, yang ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).

Pergantian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat didasari oleh ketentuan tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas utama dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

Berikut struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).

GAMBAR 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi antara lain :

- i. Perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah;
- ii. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- iii. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data, disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- iv. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- v. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- vii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian Daerah;
- viii. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- ix. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang kepegawaian sesuai peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemetaan potensi dan penilaian kompetensi bagi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BKD;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BKD;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi ASN, pengembangan ASN, serta data, disiplin, kesejahteraan ASN; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan BKD

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan BKD;
- e. penyesuaian dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BKD;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BKD; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

Subbag Rencana Kerja, Keuangan, dan Aset yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Rencana Kerja, Keuangan, dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan BKD;

- c. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Subbag Umum dan Aparatur yang bertugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan BKD;
- c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris

3) Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan dan mutasi ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan ASN, fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengadaan dan mutasi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan

fungsional, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi bagi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan

- potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan assesment, pengadaan jabatan fungsional; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengembangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data, disiplin dan kesejahteraan ASN.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan

- kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
 - f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
 - g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, sistem dan informasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kepegawaian kabupaten/kota, disiplin dan kedudukan hukum ASN, kesejahteraan dan Korps ASN; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang data, disiplin dan kesejahteraan ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

6) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu serta berdasarkan hasil penyetaraan jabatan.

Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan dimana saat ini dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) jenis jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional **analisis kepegawaian**, jabatan fungsional Analisis sumber daya manusia apartur (ASDMA) jabatan fungsional **asesor**, jabatan fungsional **pranata komputer** dan jabatan fungsional **arsiparis**.

C. Jumlah Pegawai

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 71 orang pada 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2023

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
1	Drs. ANI SOFIAN, MM 19650206 198603 1 018 RAMBAYAN, 06/02/1965	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d) 01/10/2023	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT (II. a) TMT. 25/06/2019	S2 / MAGISTER / MASTER MANAJEMEN
2	UTIN JAMIAH 19651217 198603 2 011 SELIMBAU, 17/12/1965	PENATA TK I (III/d) 01/04/2011	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA , BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 18/01/2023	SLTA UMUM A.3/IPS
3	MUHYAR, SH 19660716 199403 1 009 PONTIANAK, 16/07/1966	PEMBINA TK I (IV/b) 01/10/2015	SEKRETARIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (III. a) TMT. 24/06/2021	SARJANA S-1 TATA NEGARA
4	ABDURRAHMAN 19661002 198703 1 005 PONTIANAK, 02/10/1966	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2013	PENGELOLA KEUANGAN, SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN DAN ASET PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SLTA UMUM A.3/IPS

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
5	MARTATI, S.Sos 19670722 198811 2 001 PONTIANAK, 22/07/1967	PENATA TK I (III/d) 01/04/2017	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, SUB BIDANG DISIPLIN DAN KEDUDUKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SARJANA ADMINISTRASI NEGARA
6	LINA PURNAMA 19671116 198702 2 003 MEMPAWAH, 16/11/1967	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2007	PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN, SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KORPS APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SLTA UMUM IPA
7	Drs. SUKARYADI, M.Si 19681225 198903 1 008 BEKUT, 25/12/1968	PEMBINA TK I (IV/b) 01/04/2014	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (III. a) TMT. 03/03/2023	S2 / MAGISTER / MASTER ADMINISTRASI PUBLIK

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
8	IPUNG WIJAYA, S.Sos, MM 19690323 199303 1 006 PONTIANAK, 23/03/1969	PEMBINA TK I (IV/b) 01/04/2022	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MADYA SUB BIDANG PENYUSUNAN, PENETAPAN KEBUTUHAN, PENGADAAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN, BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	S2 / MAGISTER / MASTER MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
9	SLAMET, S.H.I 19710618 200003 1 005 WONOGIRI, 18/06/1971	PENATA (III/c) 01/04/2023	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR, SUB BIDANG JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SARJANA SYARIYAH
10	IRIANITA, SH.,MH 19711017 200701 2 010 SEBADU, 17/10/1971	PEMBINA (IV/a) 01/10/2023	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (III. a) TMT. 03/03/2023	S2 / MAGISTER / MASTER S-2 MAGISTER ILMU HUKUM
11	YUDI SATRIADI 19720512 200701 1 026 PONTIANAK, 12/05/1972	PENGATUR TK I (II/d) 01/04/2019	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI, SUB BIDANG DISIPLIN DAN KEDUDUKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SLTA UMUM A.3/IPS

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
12	AGUS TARYONO, SH 19730813 200012 1 004 PONTIANAK, 13/08/1973	PENATA TK I (III/d) 01/04/2015	PENGELOLA KEPEGAWAIAN, BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 09/05/2023	SARJANA ILMU HUKUM
13	Drs. CHARLES, M.Si 19740312 199301 1 002 PEMANGKAT, 12/03/1974	PEMBINA TK I (IV/b) 01/04/2020	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/01/2023	S2 / MAGISTER / MASTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
14	SYAHENIM 19741002 200012 1 004 SEI.MUNTIK, 02/10/1974	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2022	PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN, SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KORPS APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SLTA KEJURUAN PERKANTORAN
15	SAMSUL HUDA 19750108 200604 1 008 SEKURA, 08/01/1975	PENATA MUDA (III/a) 01/04/2022	PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN, SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KORPS APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SLTA UMUM SOSIAL

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
16	YULIANA, SM 19760323 201001 2 006 BENGKAYANG, 23/03/1976	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2022	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 10/02/2023	DIPLOMA III KESEKRETARIATAN
17	HERLINA YULIANTI, SE 19760704 201001 2 009 SINTANG, 04/07/1976	PENATA TK I (III/d) 01/04/2022	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/01/2023	SARJANA EKONOMI MANAJEMEN
18	EUSEBIUS HAPSIRE, S.E 19760811 201001 1 008 SEJIRAM, 11/08/1976	PENATA (III/c) 01/10/2023	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 02/05/2023	SARJANA AKUNTANSI
19	YUN AMALIA, S.Psi 19770602 201001 2 005 PONTIANAK, 02/06/1977	PENATA TK I (III/d) 01/04/2022	ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 24/03/2023	SARJANA PSIKOLOGI

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
20	SUKAWATI, SE 19770605 201101 2 002 SANGGAU, 05/06/1977	PENATA TK I (III/d) 01/04/2022	KEPALA SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN DAN ASET PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (IV. a) TMT. 16/01/2017	SARJANA AKUNTANSI
21	WAHYU JATMIKO 19780704 200012 1 001 KETAPANG, 04/07/1978	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2022	PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 16/08/2021	SLTA KEJURUAN PERAWAT
22	SOLIHIN 19781001 201001 1 008 SUNGAI AMBAWANG, 01/10/1978	PENGATUR MUDA TK I (II/b) 01/04/2022	PENGADMINISTRASI PERSURATAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 10/02/2022	SLTA UMUM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
23	IRWANSYAH, A.Md 19790214 201101 1 003 PONTIANAK, 14/02/1979	PENATA (III/c) 01/10/2021	ARSIPARIS PENYELIA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/09/2022	DIPLOMA III ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
24	HARDI 19790222 200901 1 004 PONTIANAK, 22/02/1979	PENGATUR TK I (II/d) 01/10/2021	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA, SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 16/08/2021	SLTA KEJURUAN PERDAGANGAN
25	SELESTINA, S.A.P 19790510 201101 2 003 MERANGIN, 10/05/1979	PENATA (III/c) 01/10/2023	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 02/05/2023	DIPLOMA III MANAJEMEN PERKANTORAN
26	YURDHA HAFIDHA, S.M 19790914 200604 2 028 PONTIANAK, 14/09/1979	PENATA (III/c) 01/04/2023	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 02/01/2023	SARJANA MANAJEMEN
27	YULIANA HUNYAANG, A.Md 19791108 200401 2 001 TELUK TELAGA, 08/11/1979	PENATA (III/c) 01/04/2020	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 18/01/2023	DIPLOMA III MANAJEMEN INFORMATIKA

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
28	RIKA INDARTI, S.Psi, M.Psi 19800204 200803 2 001 PONTIANAK, 04/02/1980	PEMBINA (IV/a) 01/10/2022	ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MADYA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 18/01/2023	S2 / MAGISTER / MASTER MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI
29	IMAM SUPINGI, S.H. 19800313 200801 1 009 TRENGGALEK, 13/03/1980	PENATA MUDA (III/a) 01/10/2021	PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN, SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KORPS APARATUR SIPIL NEGARA, BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 16/08/2021	SARJANA HUKUM
30	ANDRI YUNIARDI, S.Kom.,M.A.P 19810615 200502 1 002 PONTIANAK, 15/06/1981	PENATA TK I (III/d) 01/04/2023	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 10/02/2023	S2 / MAGISTER / MASTER ADMINISTRASI PUBLIK
31	ECI REPO, S.I.P 19820624 200502 2 002 TOHO, 24/06/1982	PENATA (III/c) 01/10/2023	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 02/05/2023	SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
32	RIDHO HATORKISAN HARAHAP, S.Kom 19830629 200902 1 003 PONTIANAK, 29/06/1983	PENATA TK I (III/d) 01/04/2021	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	SARJANA INFORMATIKA
33	NATALIA NOPRIANA, S.E. 19831118 200903 2 004 PONTIANAK, 18/11/1983	PENATA (III/c) 01/04/2023	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 02/01/2023	SARJANA MANAJEMEN
34	ANITA, S.SOS 19840101 201407 2 003 PENITI DLAM II, 01/01/1984	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2022	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 10/02/2023	SARJANA ILMU ADMINISTRASI
35	ADRIANA OLA GITARIA, S. Akun 19841019 201101 2 004 ANJUNGAN, 19/10/1984	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2022	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA , BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 24/03/2023	SARJANA AKUNTANSI

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
36	DIAN NOVITA IRIANI, S.STP 19860324 200412 2 001 SURABAYA, 24/03/1986	PENATA TK I (III/d) 01/04/2016	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	DIPLOMA IV KEUANGAN DAERAH
37	YUSSY ANGELIA, S.Ak 19860725 201101 2 001 PONTIANAK, 25/07/1986	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2023	BENDAHARA, SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN DAN ASET PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SARJANA AKUNTANSI
38	CYLAS DESIDARIUS RIANANTANG, S.S., M.A.,M.P.A. 19861213 201101 1 006 TUMBANG TITI, 13/12/1986	PENATA (III/c) 01/10/2020	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	S2 / MAGISTER / MASTER ADMINISTRASI PUBLIK
39	PITRIANA, A.Md 19870202 201101 2 009 PADAK, 02/02/1987	PENATA MUDA (III/a) 01/04/2019	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 18/01/2023	DIPLOMA III AKUNTANSI

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
40	ANGGA NUR'ADHA ANUARDI, S.STP, M.AP 19870806 200602 1 003 PONTIANAK, 06/08/1987	PENATA TK I (III/d) 01/04/2021	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (III. a) TMT. 12/09/2022	S2 / MAGISTER / MASTER MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
41	ELISABET DWI JAWATI, SH 19870820 201101 2 017 YOGYAKARTA, 20/08/1987	PENATA (III/c) 01/04/2019	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	SARJANA ILMU HUKUM
42	DIDIT WAHYUDIN, S.IP 19880208 200701 1 001 SERIMBU, 08/02/1988	PENATA TK I (III/d) 01/10/2021	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA, BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 31/12/2021	SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
43	PUTRI SANDIKA BANCIN, S.A.P 19880315 201101 2 007 P.SIANTAR, 15/03/1988	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN SUB BIDANG DATA, SISTEM, DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/02/2017	SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
44	ADITYA PERMANA, S.M. 19880825 201402 1 001 PONTIANAK, 25/08/1988	PENATA MUDA (III/a) 01/04/2022	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN, SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN DAN ASET PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 15/12/2020	SARJANA MANAJEMEN
45	INDRA AIDA, A.Md 19880928 202012 2 009 PONTIANAK, 28/09/1988	PENGATUR (II/c) 01/12/2020	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA/TERAMPIL BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 17/03/2023	DIPLOMA III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
46	LIA OKTAVIANA ANGRAINI, S.IP.,M.Si 19881029 200701 2 001 PONTIANAK, 29/10/1988	PENATA TK I (III/d) 01/04/2022	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	S2 / MAGISTER / MASTER MAGISTER SAINS
47	PUTRI KUSUMAWATI, S.M. 19890324 201101 2 002 PONTIANAK, 24/03/1989	PENATA (III/c) 01/10/2022	PRANATA KOMPUTER PENYELIA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 09/09/2022	SARJANA MANAJEMEN

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
48	SYARIF MAUDUDI ANSARI, S.IP, M.URP 19900318 201010 1 002 PONTIANAK, 18/03/1990	PENATA (III/c) 01/04/2020	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	S2 / MAGISTER / MASTER PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
49	ARY MARDANI, S.T. 19900429 202012 1 011 PONTIANAK, 29/04/1990	PENATA MUDA (III/a) 01/12/2020	PRANATA KOMPUTER PERTAMA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 17/03/2023	SARJANA S-1 TEKNIK INFORMATIKA
50	DIMAS AMARULLAH, S.IP, M.A.P 19900720 201402 1 001 PONTIANAK, 20/07/1990	PENATA (III/c) 01/10/2019	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA , BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	S2 / MAGISTER / MASTER ADMINISTRASI PUBLIK
51	PUJI EKA PURWATI, S.STP, M.Si 19910616 201010 2 001 PONTIANAK, 16/06/1991	PENATA TK I (III/d) 01/10/2022	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/12/2022	S2 / MAGISTER / MASTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
52	RAYINDA, S.IP 19911117 201502 2 001 PASER, 17/10/1991	PENATA (III/c) 01/10/2022	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (IV. a) TMT. 28/06/2021	SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
53	IBNUREZA VAIRI, S.Sos 19911204 201502 1 001 PONTIANAK, 04/12/1991	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 28/11/2020	SARJANA ILMU SOSIAL POLITIK
54	METHIE HADIANTI, S.Sos 19920525 201502 2 001 PONTIANAK, 25/05/1992	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2019	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA , BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 24/03/2023	SARJANA ILMU SOSIAL POLITIK
55	AMRI PRATAMA, S.IP, M.I.P 19920804 201502 1 001 PONTIANAK, 04/08/1992	PENATA (III/c) 01/10/2022	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 06/06/2022	S2 / MAGISTER / MASTER ILMU PEMERINTAHAN
56	VONNIE CAROLISTRIA ESTER, S.STP 19921104 201507 2 001 PAHAUMAN, 04/11/1992	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2019	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 06/04/2021	DIPLOMA IV ILMU PEMERINTAHAN
57	ANDIKA PUTRA PERWIRA BANGOEN, S.S.T.P., M.A.P 19930211 201406 1 001 SEJIRAM, 11/02/1993	PENATA (III/c) 01/10/2022	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 06/06/2022	S2 / MAGISTER / MASTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
58	TRY AGUNG PRABOWO, S.STP 19930829 201507 1 003 SEMARANG, 29/08/1993	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2020	PNS TUGAS BELAJAR , BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 30/06/2021	DIPLOMA IV ILMU PEMERINTAHAN
59	LAYARDO MARISI MANIK, S.STP 19931219 201708 1 002 PONTIANAK , 19/12/1993	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2022	PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BIDANG PENYUSUNAN, PENETAPAN KEBUTUHAN, PENGADAAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN, BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/10/2021	DIPLOMA IV PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
60	MUHAMMAD DEDY HARYADI, S.STP 19941217 201609 1 001 PONTIANAK, 17/12/1994	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2020	PENYUSUN RENCANA MUTASI SUB BIDANG PENYUSUNAN, PENETAPAN KEBUTUHAN, PENGADAAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN, BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/11/2021	DIPLOMA IV MANAJEMEN SUMBERDAYA APARATUR

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
61	FATAHUL MUBIN, S.STP 19950330 201708 1 004 PONTIANAK, 30/03/1995	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/04/2022	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR SUB BIDANG JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS, BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/11/2021	DIPLOMA IV KEUANGAN DAERAH
62	B. PARADISTY THAGANSY, S.STP., MSi 19950703 201609 2 001 PONTIANAK, 03/07/1995	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2020	PENGADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/11/2022	S2 / MAGISTER / MASTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
63	MIRDA WAHYUNI, S.Kom 19950919 202012 2 021 KAYONG UTARA, 19/09/1995	PENATA MUDA (III/a) 01/12/2020	PRANATA KOMPUTER PERTAMA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 22/04/2022	SARJANA INFORMATIKA
64	LUSIANA, A.Md 19950923 202204 2 001 PONTIANAK, 23/09/1995	PENGATUR (II/c) 01/04/2022	PENGELOLA KEUANGAN BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/04/2022	DIPLOMA III D-III TEKNIK INFORMATIKA

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
65	ALIFA RAHMI KHAIRUNISA, S.Psi 19951212 202012 2 024 SLEMAN, 12/12/1995	PENATA MUDA (III/a) 01/12/2020	ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA, BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 13/09/2022	SARJANA PSIKOLOGI
66	ELMA AYU ADHA, S.STP.,M.A.P. 19960428 201708 2 001 MEMPAWAH, 28/04/1996	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2021	ANALIS JABATAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/02/2022	S2 / MAGISTER / MASTER ADMINISTRASI PUBLIK
67	DESY RIZKI ANGGRAINY, S.Psi 19961231 202012 2 021 PONTIANAK, 31/12/1996	PENATA MUDA (III/a) 01/12/2020	ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA, BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 13/09/2022	SARJANA PSIKOLOGI
68	ASEP AGUSTIAN MAULANA, S.Tr. IP 19970812 202108 1 001 PONTIANAK, 12/08/1997	PENATA MUDA (III/a) 01/08/2022	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 03/10/2022	DIPLOMA IV POLITIK PEMERINTAHAN

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT DAN TGL.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM
69	NUR AULIA, S.STP 19980428 201808 2 001 KUBU RAYA, 28/04/1998	PENATA MUDA TK I (III/b) 01/10/2022	PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BIDANG KEPANGKATAN WILAYAH I, BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/11/2021	DIPLOMA IV POLITIK PEMERINTAHAN
70	ADE WULAN RAMADHANTI, S.A.P. 19990116 202204 2 003 PONTIANAK, 16/01/1999	PENATA MUDA (III/a) 01/04/2022	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 19/06/2023	SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
71	FARAH QAULI AZHAR, A.Md.M. 19991104 202204 2 001 PONTIANAK, 04/11/1999	PENGATUR (II/c) 01/04/2022	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (----) TMT. 01/04/2022	DIPLOMA III D-III MANAJEMEN ASET

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar per 31 Desember 2023

D. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja

TABEL 2. TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA T.A. 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI	%	SISA
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03	KEPEGAWAIAN	17.203.029.150	17.203.029.150	18.257.653.082	18.114.151.260	99,21	143.501.822
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.921.552.641	12.847.064.541	12.550.905.682	12.511.700.492	99,69	39.205.190
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.498.300	107.498.300	52.598.300	51.658.191	98,21	940.109
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.408.983.170	11.408.983.170	10.276.132.018	10.259.969.917	99,84	16.162.101
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.539.700	24.539.700	8.139.700	7.982.020	98,06	157.680
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.512.600	180.512.600	116.069.600	115.333.616	99,37	735.984
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.816.791	580.816.791	957.170.980	955.763.798	99,85	1.407.182
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.800.000	62.800.000	694.093.500	691.264.556	99,59	2.828.944
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.697.760	340.209.660	281.997.264	268.359.094	95,16	13.638.170
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.704.320	141.704.320	164.704.320	161.369.300	97,98	3.335.020
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.281.476.509	4.355.964.609	5.706.747.400	5.602.450.768	98,17	104.296.632

KODE	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI	%	SISA
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	925.062.000	1.170.180.000	2.187.704.300	2.169.997.403	99,19	17.706.897
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.162.516.500	991.886.600	1.411.124.500	1.375.957.937	97,51	35.166.563
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.715.468.709	1.715.468.709	1.666.576.700	1.643.459.995	98,61	23.116.705
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	478.429.300	478.429.300	441.341.900	413.035.433	93,59	28.306.467

Sumber : Laporan realisasi fisik dan keuangan BKD Prov. Kalbar 2023

E. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sub Kegiatan

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI	%	SISA
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03	KEPEGAWAIAN	17.203.029.150	17.203.029.150	18.257.653.082	18.114.151.260	99,21	143.501.822
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.921.552.641	12.847.064.541	12.550.905.682	12.511.700.492	99,69	39.205.190
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.498.300	107.498.300	52.598.300	51.658.191	98,21	940.109
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.041.400	23.041.400	6.241.400	6.191.650	99,20	49.750
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.594.400	15.594.400	4.394.400	4.203.472		
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.962.600	12.962.600	11.462.600	11.284.716		
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.322.300	9.322.300	9.322.300	9.063.552	97,22	258.748
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.095.100	18.095.100	15.095.100	14.933.374	98,93	161.726
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.482.500	28.482.500	6.082.500	5.981.427	98,34	101.073
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.408.983.170	11.408.983.170	10.276.132.018	10.259.969.917	99,84	16.162.101
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.119.469.070	11.119.469.070	10.023.517.918	10.010.402.868	99,87	13.115.050
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.560.000	229.560.000	229.560.000	226.860.000	98,82	2.700.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI	%	SISA
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.934.600	2.934.600	2.934.600	2.815.300	95,93	119.300
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57.019.500	57.019.500	20.119.500	19.891.749	98,87	227.751
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.539.700	24.539.700	8.139.700	7.982.020	98,06	157.680
5.03.01.1.03.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2.637.600	2.637.600	2.637.600	2.543.760	96,44	93.840
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.902.100	21.902.100	5.502.100	5.438.260	98,84	63.840
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.512.600	180.512.600	116.069.600	115.333.616	99,37	735.984
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.500.000	64.500.000	57.577.000	57.577.000	100,00	-
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.319.600	30.319.600	14.619.600	14.461.061	98,92	158.539
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	51.298.000	51.298.000	11.378.000	11.213.555	98,55	164.445
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	22.000.000	22.000.000	21.917.000	99,62	83.000
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.375.000	98,14	45.000
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.975.000	9.975.000	8.075.000	7.790.000	96,47	285.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI	%	SISA
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.816.791	580.816.791	957.170.980	955.763.798	99,85	1.407.182
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.410.500	18.410.500	18.410.500	18.402.690	99,96	7.810
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.892.200	115.892.200	146.029.200	145.637.858	99,73	391.342
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.641.400	52.641.400	57.151.400	57.050.567	99,82	100.833
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.473.500	121.473.500	216.734.500	216.646.439	99,96	88.061
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00	-
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.280.000	95.280.000	67.200.000	67.124.950	99,89	75.050
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.398.891	68.398.891	376.723.880	376.465.853	99,93	258.027
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.262.300	25.262.300	15.562.300	15.377.513	98,81	184.787
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.458.000	53.458.000	29.359.200	29.057.928	98,97	301.272
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.800.000	62.800.000	694.093.500	691.264.556	99,59	2.828.944
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	54.534.900	54.466.782	99,88	68.118
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	576.758.600	574.144.934	99,55	2.613.666

KODE	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI	%	SISA
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.800.000	62.800.000	62.800.000	62.652.840	99,77	147.160
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.697.760	340.209.660	281.997.264	268.359.094	95,16	13.638.170
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.300.000	22.300.000	20.202.000	20.199.000	99,99	3.000
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.397.760	316.909.660	261.795.264	248.160.094	94,79	13.635.170
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.704.320	141.704.320	164.704.320	161.369.300	97,98	3.335.020
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.010.000	50.010.000	60.010.000	56.701.300	94,49	3.308.700
5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebelair			3.000.000	3.000.000	100,00	-
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.694.320	91.694.320	101.694.320	101.668.000	99,97	26.320
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.281.476.509	4.355.964.609	5.706.747.400	5.602.450.768	98,17	104.296.632
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	925.062.000	1.170.180.000	2.187.704.300	2.169.997.403	99,19	17.706.897
5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	33.404.300	33.404.300	16.804.300	16.566.057	98,58	238.243

KODE	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI	%	SISA
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	75.850.500	320.968.500	267.468.500	265.502.449	99,26	1.966.051
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	173.117.900	173.117.900	1.405.064.900	1.396.576.028	99,40	8.488.872
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	105.531.200	105.531.200	29.031.200	27.395.997	94,37	1.635.203
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	160.751.600	160.751.600	135.251.600	133.626.203	98,80	1.625.397
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	42.322.700	42.322.700	-	-	-	-
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	187.716.200	187.716.200	187.716.200	186.452.114	99,33	1.264.086
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	128.750.200	128.750.200	128.750.200	126.507.230	98,26	2.242.970
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	17.617.400	17.617.400	17.617.400	17.371.325	98,60	246.075
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.162.516.500	991.886.600	1.411.124.500	1.375.957.937	97,51	35.166.563
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	81.974.000	81.974.000	16.374.000	16.149.398	98,63	224.602
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	286.503.400	115.873.500	271.871.400	266.286.723	97,95	5.584.677
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	794.039.100	794.039.100	1.122.879.100	1.093.521.816	97,39	29.357.284
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.715.468.709	1.715.468.709	1.666.576.700	1.643.459.995	98,61	23.116.705
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	41.807.000	41.807.000	-	-	-	-
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	250.888.900	250.888.900	239.577.800	237.629.781	99,19	1.948.019
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	639.485.700	639.485.700	494.241.100	491.107.995	99,37	3.133.105

KODE	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI	%	SISA
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	488.691.009	488.691.009	702.993.100	689.097.616	98,02	13.895.484
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	53.458.600	53.458.600	52.677.200	52.509.865	99,68	167.335
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	16.682.600	16.682.600	5.732.600	5.633.600	98,27	99.000
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	66.398.500	66.398.500	59.098.500	58.268.675	98,60	829.825
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	52.835.000	52.835.000	19.985.000	19.981.750		
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	105.221.400	105.221.400	92.271.400	89.230.713	96,70	3.040.687
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	478.429.300	478.429.300	441.341.900	413.035.433	93,59	28.306.467
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.145.000	13.145.000	1.200.000	1.200.000	100,00	-
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	81.793.600	81.793.600	95.461.300	95.206.001	99,73	255.299
5.03.02.1.04.03	Pengelolaan Penghargaan Bagi Pegawai	52.338.300	52.338.300	61.248.300	46.199.865	75,43	15.048.435
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	52.986.600	52.986.600	52.986.600	49.586.001	93,58	3.400.599
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	133.825.300	133.825.300	119.005.200	114.071.093	95,85	4.934.107
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	84.647.000	84.647.000	89.197.000	84.889.769	95,17	4.307.231
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	33.631.100	33.631.100	12.231.100	12.132.304	99,19	98.796
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	26.062.400	26.062.400	10.012.400	9.750.400	97,38	262.000

Sumber : Laporan realisasi fisik dan keuangan BKD Prov. Kalbar 2023

I.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui serta perlu untuk segera diatasi antara lain :

- 1) Pengembangan karier jabatan fungsional berkaitan dengan pelaksanaan diklat dan uji kompetensi baik untuk pengangkatan maupun kenaikan jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk mendukung pengiriman peserta dalam mengikuti diklat dan uji kompetensi sedangkan beberapa Perangkat Daerah belum memiliki pos anggaran untuk memfasilitasi pengiriman diklat dan uji kompetensi tersebut;
- 2) Kurang informatifnya Instansi Pembina Jabatan Fungsional dalam memberikan informasi aktual kepada Pemerintah Daerah yang menyulitkan BKD dalam menerima informasi maupun peraturan terbaru tentang jabatan fungsional. Selain itu terdapat perbedaan peraturan teknis antara jabatan fungsional dalam pengembangan karier jabatan fungsional. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya informasi kepada OPD serta pegawai terutama terkait dengan pelayanan jabatan fungsional yang dilaksanakan.
- 3) Sulitnya melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar dimana tidak memiliki data nomor telepon Guru SMA/SMK/SLB yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Adapun penyampaian informasi dilakukan lewat Kepala Sekolah;
- 4) Jumlah PNS yang banyak dan tersebar di wilayah Prov. Kalbar yang sangat luas dengan keterbatasan sarana transportasi dan jaringan informasi yang tersedia beberapa Kabupaten dan Kota serta adanya peraturan tentang mekanisme penyusunan SKP model baru yang belum menjangkau seluruh pegawai sehingga menghambat penyusunan SKP pegawai;

- 5) Belum terbangunnya komitmen bersama dan masih terdapatnya perbedaan persepsi antara pimpinan OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemprov Kalbar sehingga PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS belum dapat dijalankan secara konsisten dan maksimal. Selain itu minimnya pengetahuan tentang mekanisme penanganan pelanggaran disiplin PNS dan tata cara penjatuhan disiplin PNS yang berimplikasi pada pembiaran pelanggaran disiplin PNS dilingkungannya sehingga akibat dari pembiaran tersebut, maka kasus-kasus yang semula berdampak ringan berkembang menjadi rumit dan kompleks sehingga sulit untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama;
- 6) Minimnya ketersediaan dokumen pendukung data yang akan dimutakhirkan sehingga membutuhkan waktu yang Panjang untuk verifikasi data dalam hal pemutakhiran data pegawai yang ada pada sistem kepegawaian;
- 7) Adanya keterlambatan pengusulan pelayanan kepegawaian antara lain terkait kepangkatan dan pensiun yang dilakukan oleh OPD masing terutama fungsional guru SMA/SMK khususnya yang berada dipedalaman wilayah.
- 8) Adanya perubahan terhadap aturan-aturan terkait kepegawaian oleh pemerintah pusat sehingga membutuhkan waktu dalam menerapkan kebijakan tersebut di daerah.

B. Program Perangkat Daerah Berdasarkan RPJMD

Sebagai langkah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, telah disusun program kegiatan yang mengacu pada peningkatan profesionalisme ASN serta program dan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang digunakan pada tahun anggaran 2022 telah disesuaikan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimana Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar mengakomodir 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kepegawaian.

C. Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah yang telah disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyempurnaan (DPA Penyempurnaan), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian kegiatan, sub kegiatan, dan alokasi anggaran sebagai berikut:

TABEL 4 Alokasi Penganggaran Kegiatan TA. 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03	KEPEGAWAIAN	17.203.029.150	17.203.029.150	18.257.653.082
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.921.552.641	12.847.064.541	12.550.905.682
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.498.300	107.498.300	52.598.300
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.041.400	23.041.400	6.241.400
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.594.400	15.594.400	4.394.400
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.962.600	12.962.600	11.462.600
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.322.300	9.322.300	9.322.300
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.095.100	18.095.100	15.095.100
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.482.500	28.482.500	6.082.500
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.408.983.170	11.408.983.170	10.276.132.018
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.119.469.070	11.119.469.070	10.023.517.918

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.560.000	229.560.000	229.560.000
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.934.600	2.934.600	2.934.600
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57.019.500	57.019.500	20.119.500
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.539.700	24.539.700	8.139.700
5.03.01.1.03.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2.637.600	2.637.600	2.637.600
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.902.100	21.902.100	5.502.100
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.512.600	180.512.600	116.069.600
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.500.000	64.500.000	57.577.000
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.319.600	30.319.600	14.619.600
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	51.298.000	51.298.000	11.378.000
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	22.000.000	22.000.000
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.420.000	2.420.000	2.420.000
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.975.000	9.975.000	8.075.000
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.816.791	580.816.791	957.170.980
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.410.500	18.410.500	18.410.500
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.892.200	115.892.200	146.029.200
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.641.400	52.641.400	57.151.400
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.473.500	121.473.500	216.734.500
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.280.000	95.280.000	67.200.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.398.891	68.398.891	376.723.880
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.262.300	25.262.300	15.562.300

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.458.000	53.458.000	29.359.200
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.800.000	62.800.000	694.093.500
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	54.534.900
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	576.758.600
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.800.000	62.800.000	62.800.000
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.697.760	340.209.660	281.997.264
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.300.000	22.300.000	20.202.000
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	1.000.000	-
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.397.760	316.909.660	261.795.264
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.704.320	141.704.320	164.704.320
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.010.000	50.010.000	60.010.000
5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebelair			3.000.000
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.694.320	91.694.320	101.694.320
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.281.476.509	4.355.964.609	5.706.747.400
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	925.062.000	1.170.180.000	2.187.704.300
5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	33.404.300	33.404.300	16.804.300
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	75.850.500	320.968.500	267.468.500
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	173.117.900	173.117.900	1.405.064.900
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	105.531.200	105.531.200	29.031.200
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	160.751.600	160.751.600	135.251.600
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	42.322.700	42.322.700	-

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		DPA	Penyempurnaan	Perubahan
1	2	3	4	5
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	187.716.200	187.716.200	187.716.200
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	128.750.200	128.750.200	128.750.200
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	17.617.400	17.617.400	17.617.400
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.162.516.500	991.886.600	1.411.124.500
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	81.974.000	81.974.000	16.374.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	286.503.400	115.873.500	271.871.400
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	794.039.100	794.039.100	1.122.879.100
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.715.468.709	1.715.468.709	1.666.576.700
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	41.807.000	41.807.000	-
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	250.888.900	250.888.900	239.577.800
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	639.485.700	639.485.700	494.241.100
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	488.691.009	488.691.009	702.993.100
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	53.458.600	53.458.600	52.677.200
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	16.682.600	16.682.600	5.732.600
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	66.398.500	66.398.500	59.098.500
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	52.835.000	52.835.000	19.985.000
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	105.221.400	105.221.400	92.271.400
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	478.429.300	478.429.300	441.341.900
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.145.000	13.145.000	1.200.000
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	81.793.600	81.793.600	95.461.300
5.03.02.1.04.03	Pengelolaan Penghargaan Bagi Pegawai	52.338.300	52.338.300	61.248.300
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	52.986.600	52.986.600	52.986.600
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	133.825.300	133.825.300	119.005.200
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	84.647.000	84.647.000	89.197.000
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	33.631.100	33.631.100	12.231.100
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	26.062.400	26.062.400	10.012.400

Sumber : Laporan realisasi fisik dan keuangan BKD Prov. Kalbar 2023

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

II.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki capaian kinerja Indikator kinerja kunci keluaran.

II.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki capaian kinerja Indikator kinerja kunci Hasil.

II.1.3 IKK Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan Surat Pj. Gubernur Kalimantan Barat nomor 100.1.7/5586/RO-PERM tanggal 30 November 2023 hal Permintaan Data Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 serta Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.2./8697/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat diwajibkan untuk menyampaikan data Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu urusan kepegawaian. Terdapat 3 (tiga) *outcome* indikator kinerja kunci yang diamanatkan kepada BKD Prov. Kalbar pada Tahun 2023 dimana *outcome* dan capaian kerjanya yaitu :

1. IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan)

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Capaian Kinerja	:	$\frac{3.196}{4.398} \times 100\% = 72,67\%$

2. IKK Outcome : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Capaian Kinerja	:	$\frac{1.309}{5.056} \times 100\% = 29,76\%$

3. IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Capaian Kinerja	:	$\frac{1.309}{1.309} \times 100\% = 100\%$

Sumber : Simpeg Kalbar 2024 (data diolah)

II.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

II.2.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Gubernur Kalimantan Barat Terpilih mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Terdapat perubahan indikator kinerja yang diampu oleh BKD Prov. Kalbar berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai SAKIP Kalbar. Selain itu, terdapat pula penambahan indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan

Kepala OPD dimana perubahan tersebut didasari oleh adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 065/3473/RO-ORG tanggal 22 September 2022 hal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah dimana seluruh kepala perangkat daerah wajib mencantumkan Indeks RB dan Nilai SAKIP pada perjanjian kinerja kepala OPD sehingga hal tersebut menjadi acuan dalam melakukan perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 serta masih berlanjut hingga tahun berikutnya. Selanjutnya perjanjian kinerja Kepala BKD Prov. Kalbar Tahun 2023 yaitu :

TABEL 5. Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Target Kinerja 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	50,5
		1.2. Indeks RB Perangkat Daerah	Predikat	BB
		1.3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,6

Sumber : BKD Prov. Kalbar Tahun 2023.

II.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2023 serta perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada matrik di bawah ini :

TABEL 6. Capaian Kinerja IKU TA. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2023		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1.	Indeks Profesionalitas ASN	50,5	70,18 *	138,97
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1				138,97
2.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1.	Indeks RB Perangkat Daerah	BB	BB *	100
		2.2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6	80,9	100,37
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 2				119,58

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2024.

Catatan : *) Data Sementara, Capaian Tahun 2022.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Renstra Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Meningkatkan Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD dimana telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator tersebut merupakan penjabaran dari misi ke 2 Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*” yang telah mengalami perubahan terhadap indikator sebelumnya yang disebabkan oleh hasil dari evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Capaian yang diperoleh merupakan capaian Tahun 2022 yang didapat melalui hasil koordinasi bersama BKN RI dimana surat resmi terhadap nilai akhir Tahun 2023 diperkirakan akan terbit pada akhir Triwulan II Tahun 2024. Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh yaitu 70,18 dengan skala 1-100 dan menandakan bahwa capaian pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50,5 sesuai perjanjian kinerja. Komponen pencapaian kinerja terbagi atas dimensi kualifikasi (skor 21,5), kompetensi (skor 18,87), kinerja (24,81), dan disiplin (5).

Pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh berdasarkan hasil verifikasi oleh BKN RI melalui aplikasi SIASN, berada pada kategori rendah (61-70) dimana untuk mencapai kategori sedang membutuhkan nilai di range 71-80.

2. Indeks RB Perangkat Daerah

Capaian Indeks RB pada tahun 2023 merupakan penilaian RB yang dilakukan untuk tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat Inspektur Provinsi Kalimantan Barat nomor 700/185/ITPROV tanggal 22 Juni 2022 hal Reviu PMPRB atas LKE Unit pada BKD Prov. Kalbar dimana nilai RB yang diperoleh BKD Prov. Kalbar melalui penilaian LKE PMPRB yang disusun secara offline dan bukti pendukung yang telah dilaksanakan selama periode penilaian pada Bulan Mei 2021 s.d Bulan April Tahun 2022 adalah 26,87 (74,01%) dengan kategori BB.

Pelaksanaan penerapan RB di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan penilaian yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa catatan dan saran hasil

revisi yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki dalam rangka peningkatan nilai RB ditahun mendatang.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian Nilai SAKIP pada tahun 2023 penilaian RB yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat Inspektur Provinsi Kalimantan Barat nomor 700.1.2.7/31/ITPROV tanggal 25 Agustus 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2023 dimana nilai SAKIP yang diperoleh BKD Prov. Kalbar melalui penilaian LKE SAKIP yang disusun secara offline dan bukti pendukung yang telah dilaksanakan adalah 80,90 dengan predikat A.

Pelaksanaan penerapan SAKIP di BKD Prov. Kalbar telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 (empat) komponen penilaian yang dilaksanakan yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Predikat A yang telah dicapai menunjukkan bahwa akuntabilitas yang telah diterapkan memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Namun terdapat beberapa saran dan perbaikan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan dengan harapan agar kedepannya capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara menyeluruh terhadap komponen yang dinilai.

II.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Perbandingan pencapaian kinerja tahunan dari 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SAT	Realisasi		
					2022	2023	%
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70,18	70,18*	100
2	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	2.1	Indeks RB Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB *	100
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,6	80,9	100,37

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2024.

Catatan : *) Data Sementara, Capaian Tahun 2022.

Persentase tingkat kemajuan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN serta Capaian kinerja Indeks RB Perangkat Daerah belum dapat dibandingkan. Hal tersebut disebabkan oleh kedua indikator tersebut belum memiliki capaian pada tahun 2023. Sedangkan capaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan tingkat kemajuan sebesar 100,37%

II.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan RPJMD

Terdapat perubahan target indikator yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan kondisi

kepegawaian pada saat perubahan dilakukan dimana target pada tahun 2023 sama dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu target sebesar 50,5% dan capaian kinerja sebesar 70,18 (capaian sementara tahun 2022) dengan tingkat kemajuan yang belum dapat dihitung. Sedangkan untuk indikator Indeks RB Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator tambahan sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah nomor 065/3473/RO-ORG tanggal 22 September 2022 hal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah sehingga kedua indikator tersebut belum masuk pada Renstra BKD Tahun 2018-2023 maupun RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

II.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

TABEL 8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Program Kepegawaian	5.596.629.888	5.333.435.640	98,17	138,97	40,8
	Sub Total	5.596.629.888	5.333.435.640	98,17		
Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.550.905.682	12.511.700.492	99,69	100,19	0,5
	Sub Total	12.550.905.682	12.511.700.492	99,69		
TOTAL		18.257.653.082	18.114.151.260	99,21	119,58	20,37

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis 1 apabila membandingkan antara realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,69% dan realisasi kinerja sebesar 138,97%, maka akan memperoleh Efisiensi penggunaan sumber daya senilai 40,8. Sedangkan untuk sasaran strategis 2 diperoleh Efisiensi penggunaan sumber daya senilai 0,5 yang diperoleh apabila membandingkan antara realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,17% dan realisasi kinerja sebesar 100,19%.

Total Efisiensi penggunaan sumber daya apabila menggabungkan kedua sasaran strategis yang diampu oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat apabila membandingkan antara persentase total realisasi anggaran sebesar 99,21% dan realisasi rerata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebesar 119,58%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang diperoleh senilai 20,37.

II.2.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian berbagai indikator capaian juga merupakan bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari seluruh bidang yang saling terkait antara satu dan lainnya. Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN yang ada pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi, kompetensi, disiplin, dan kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh kegiatan berperan besar dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Namun tanpa adanya dukungan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pelayanan, maka dapat dipastikan pencapaian indikator tersebut tidak akan dapat dicapai dengan maksimal seperti yang telah diperoleh saat ini. Selain itu dalam penapaian Indeks Profesionalitas ASN memuat bukti dukung yang didapat oleh OPD dan masing-masing PNS sehingga apabila bukti dukung tersebut tidak diinput oleh OPD atauoun masing-masing PNS tidak melakukan pemenuhan bukti dukung maka akan sangat berpengaruh pada pencapaian nilai Indeks Profesionalitas ASN.

Keberhasilan maupun kegagalan dari seluruh bidang yang saling terkait antara satu dan lainnya tersebut juga mempengaruhi capaian indikator penerapan Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimana juga seluruh kegiatan berperan besar dalam menunjang pencapaian kedua indikator tersebut, namun juga dapat dikatakan bahwa pencapaian tersebut tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang-bidang.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan pelaksanaan Program / Kegiatan / dan Sub Kegiatan serta penganggaran yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, **tidak terdapat** pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan / yang diterima dari Pemerintah pusat.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan pelaksanaan Program / Kegiatan / dan Sub Kegiatan serta penganggaran yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, **tidak terdapat** pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah OPD yang memiliki urusan pelayanan dasar.

BAB V

PENUTUP

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan TA. 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 dan Rencana Kerja TA. 2023 dimana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan isu strategis yang berkembang di Kalbar serta dalam rangka pencapaian target RPJMD Kalbar 2018-2023. Namun demikian, banyak perubahan aturan terhadap urusan kepegawaian tengah terjadi saat ini mengakibatkan masih terjadinya penyesuaian penerapan kebijakan tersebut di daerah mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dimana terhambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi baik pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah pada seluruh wilayah Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LPPD menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LPPD akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

I. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) PROVINSI

I.1 IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan)

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	: Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Capaian Kinerja	: $\frac{3.196}{4.398} \times 100\% = 72,67\%$

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI Kalimantan BARAT



Drs. ANI SOFIAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650206 198603 1 018

**DATA DUKUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

I. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) PROVINSI

I.1 IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan)

NO	PERANGKAT DAERAH	PEGAWAI DENGAN PENDIDIKAN SMA KE BAWAH			PEGAWAI DENGAN PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI							TOTAL
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA I	DIPLOMA II	DIPLOMA III	DIPLOMA IV	SARJANA	S2 / MAGISTER / MASTER	S3 / DOKTOR	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	9	0	0	8	8	29	17	0	71
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	0	9	0	0	2	1	10	9	0	32
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	12	0	0	25	7	33	13	0	90
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	5	0	0	6	0	17	7	0	35
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	47	0	0	56	10	58	25	0	196
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	2	0	0	2	2	14	13	1	34
7	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0	0	6	0	0	1	2	11	7	0	27
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	20	0	0	6	4	18	25	2	75
9	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	0	2	7	0	0	6	1	8	2	0	26
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1	5	0	0	2	3	34	29	1	75
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	2	35	0	0	15	10	52	11	0	128
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	31	0	0	0	4	22	14	0	71
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	5	0	0	11	5	13	10	0	45
14	DINAS KESEHATAN	1	1	36	5	0	43	6	56	31	0	179
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	1	6	0	0	1	0	25	8	0	41
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	7	0	0	5	3	27	10	0	52
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	0	8	0	0	6	0	30	8	0	52
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1	4	91	0	0	9	2	160	47	0	314
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	23	0	0	17	14	37	15	0	106
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	1	5	0	0	3	1	11	12	0	33
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	8	1	0	7	5	13	18	1	53
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	7	0	0	4	3	19	14	0	47
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	12	190	4	3	43	7	327	46	1	633
24	DINAS PERHUBUNGAN	0	2	24	0	0	12	2	26	8	0	74
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	35	0	0	9	2	56	15	1	118
26	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	1	3	21	0	0	16	2	71	18	0	132
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	0	24	0	0	5	0	33	11	0	74
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1	14	1	0	8	4	21	12	0	61
29	DINAS SOSIAL	1	1	33	4	0	4	4	42	14	0	103
30	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	4	103	0	0	18	1	134	19	0	279
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	21	0	0	14	1	64	24	0	124

NO	PERANGKAT DAERAH	PEGAWAI DENGAN PENDIDIKAN SMA KE BAWAH			PEGAWAI DENGAN PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI							TOTAL
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA I	DIPLOMA II	DIPLOMA III	DIPLOMA IV	SARJANA	S2 / MAGISTER / MASTER	S3 / DOKTOR	
32	INSPEKTORAT	0	0	10	0	0	20	6	49	28	0	113
33	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	0	1	20	0	0	23	6	16	4	0	70
34	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO	2	11	120	3	1	65	7	69	18	0	296
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	0	57	0	0	1	2	33	10	0	104
36	SEKRETARIAT DAERAH	2	0	61	0	0	31	35	154	87	1	371
37	SEKRETARIAT DPRD	1	1	21	0	0	5	2	27	7	0	64
Jumlah		16	48	1138	18	4	509	172	1819	666	8	4.398
TOTAL DATA DUKUNG		1202			3196							

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI Kalimantan BARAT



Drs. ANI SOFIAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650206 198603 1 018

**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

- I. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) PROVINSI**
I.2 IKK Outcome : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Konsep/Definisi	: Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	: Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Capaian Kinerja	: $\frac{1.309}{4.398} \times 100\% = 29,76\%$

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI Kalimantan BARAT



Drs. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650206 198603 1 018


**DATA DUKUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

I. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) PROVINSI

I.2 IKK Outcome : Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI PEMPROV
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	38	71
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	32
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	90
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	35
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	196
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18	34
7	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0	27
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27	75
9	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	0	26
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	46	75
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	28	128
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14	71
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	45
14	DINAS KESEHATAN	15	179
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	16	41
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24	52
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	18	52
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	60	314
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26	106
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	33
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	53
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23	47
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	190	633
24	DINAS PERHUBUNGAN	6	74
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA	44	118
26	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	59	132
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	42	74
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	61
29	DINAS SOSIAL	19	103
30	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	153	279
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	64	124
32	INSPEKTORAT	77	113
33	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	10	70
34	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO	39	296
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34	104
36	SEKRETARIAT DAERAH	131	371
37	SEKRETARIAT DPRD	9	64
TOTAL		1309	4398

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI Kalimantan BARAT


Dr. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650206 198603 1 018

**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

I. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) PROVINSI

I.3 IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Konsep/Definisi	: Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> $\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ </div>
Keterangan	: Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Capaian Kinerja	: $\frac{1.309}{1.309} \times 100\% = 100\%$

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI Kalimantan BARAT



Drs. ANI SOFIAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650206 198603 1 018

**DATA DUKUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

I. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) PROVINSI

I.3 IKK OUTCOME : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI FUNGSIONAL YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI	JUMLAH PEGAWAI FUNGSIONAL
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	38	38
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	8
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	12
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	14
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	1
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18	18
7	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0	0
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27	27
9	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	0	0
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	46	46
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	28	28
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14	14
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	16
14	DINAS KESEHATAN	15	15
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	16	16
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24	24
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	18	18
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	60	60
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26	26
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	8
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	9
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23	23
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	190	190
24	DINAS PERHUBUNGAN	6	6
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44	44
26	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	59	59
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	42	42
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	11
29	DINAS SOSIAL	19	19
30	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	153	153
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	64	64
32	INSPEKTORAT	77	77
33	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	10	10
34	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO	39	39
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34	34
36	SEKRETARIAT DAERAH	131	131
37	SEKRETARIAT DPRD	9	9
	TOTAL	1309	1309

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI Kalimantan BARAT


Drs. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650206 198603 1 018